



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2016-2022. Rencana kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Perikanan dalam satu tahun anggaran serta target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2022 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Oleh sebab itu, dokumen ini sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Dinas Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya, terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Aparatur Dinas Perikanan.

Mukomuko, 2021

**Dinas Perikanan
Kabupaten Mukomuko;**

KEPALA



EDDY APRIYANTO, SP, M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19690417 199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 5
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	I - 5
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	I - 6
1.4 Sistematika Penyusunan	I - 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2019	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 Dan Capaian Renstra Dinas Perikanan.....	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	II - 21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II - 29
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II - 46
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan.....	III - 11
3.2.1. Tujuan.....	III - 11
3.2.2. Sasaran	III - 11
3.3 Program Kegiatan.....	III - 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022	IV - 1
BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	II - 3
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	II - 22
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	II - 31
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	II - 46
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional/Propinsi Bengkulu Untuk Lima Tahunan.....	III - 2
Tabel 3.2 Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Propinsi Bengkulu Tahun 2021	III - 4
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023	IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

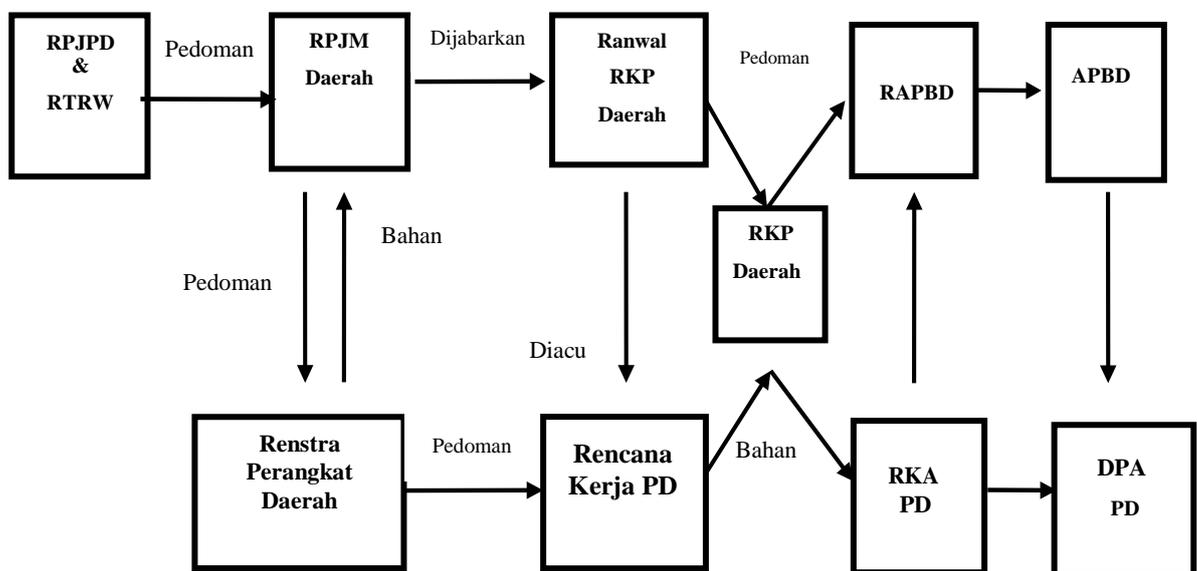
Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Mukomuko sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja, yakni sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 , tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 31);
 17. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 32);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan serta kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Mukomuko Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Secara lebih spesifik, maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Dinas Perikanan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Mukomuko di bidang kelautan dan perikanan sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Dinas Perikanan, Fungsi Renja Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Perikanan, keterkaitan Renja Dinas Perikanan dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perikanan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perikanan sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses itu dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Perikanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Berisikan Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2022

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perikanan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mukomuko pada tahun 2020 telah melaksanakan 14 (empat belas) program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan sebagai mana tercantum dalam penetapan kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Hasil analisis pencapaian kinerja 13 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2020, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 83,34%.

Pada dasarnya program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan hasil/keluaran yang ditargetkan. Namun demikian pada pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp. 685.009.613,- atau sebesar 16,76% dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.086.535.500,- hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya proses pembayaran yang tidak selesai 100%. Uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. SILPA yang ada merupakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dan tidak mengganggu pencapaian target program/kegiatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu terdapat sebanyak 49

Kegiatan realisasi hasil/keluaran memenuhi target yang telah direncanakan, dengan nilai capaian 100 %.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu : Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yaitu :
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyusun rencana kerja anggaran program/kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.1**:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2020					Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s.d Tahun 2021				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%	K	Rp.	K	%			
																	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2020
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		10		11			
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,376,347,073	-	1,370,798,937		963,025,300	-	931,159,316	-	96.69		990,586,000				
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Penyediaan Surat Menyurat	12	bulan	1,320,000	-	-								12	100%		
			Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	1286	lembar	6,930,000	643	Lembar	2,772,000	321	1,386,000	321	1,386,000	100	100.0	321	1,386,000	1286	100%
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	bulan	247,681,188	24	Bln	82,805,207	12	58,500,000	12	52,133,541	100	89.1	12	90,000,000	72	100%
3		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	120	orang	789,088,500	30	org	183,018,500	16	135,270,000	16	135,270,000	100	100.0	20	132,200,000	120	100%
4		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor	17	orang	102,258,710	7	org	42,000,000	3	36,000,000	3	36,000,000	100	100.0	3	36,000,000	17	100%
5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jangka waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	bulan	18,476,000	-	Bln	-									12	100%
			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	178	jenis	107,435,122	58		31,803,500	18	20,518,300	18	20,311,000	100	99.0	40	22,000,000	178	100%

6			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	20,178,900	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38	jenis	114,201,613	4		36,788,850	5	21,727,000	5	21,607,000	100	99.4	9	25,000,000	38	100%
7			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jangka Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	bulan	1,500,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	22	jenis	7,875,000	10		3,123,000	6	31,575,000	6	30,893,872	100	97.8	7	20,000,000	22	100%
8			Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	bulan	5,000,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	4	100%			
				Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	139	jenis	180,750,000	34		9,979,500	19	8,222,000	19	6,819,000	100	82.9	10	10,000,000	139	100%
9			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	11,676,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	jenis	53,081,800	3		25,291,200	1	18,435,000	1	14,925,000	100	81.0	2	20,000,000	6	100%
10			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jangka Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan	38,350,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	20	jenis	212,036,044	11		63,828,500	3	35,536,000	3	35,536,000	100	100.0	3	30,000,000	20	100%

11			Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Jangka Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12	Bulan	267,949,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	159	kali	658,398,446	59		352,656,442	54	191,296,000	51	173,047,903	94	90.5	57	180,000,000	159	100%
12			Rapat-rapat koordinasi kedalam daerah	Jangka Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah	12	Bulan	70,175,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah	1087	kali	406,335,750	309		139,237,238	242	59,561,000	235	58,230,000	97	97.8	190	40,000,000	1087	100%
13			Jasa Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kantor	12	Bulan	70,900,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	12	100%			
				Jumlah Penerima Jasa Kantor	140	orang	984,750,000	56		397,495,000	31	345,000,000	31	345,000,000	100	100.0	32	384,000,000	140	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)													99.35	95.19						
Predikat kinerja													ST	ST						
II			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			1,061,758,710	-		262,735,725		149,236,000	-	238,563,225	-	159.86		146,940,000		
				Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik																
1			Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jangka Waktu pemeliharaan kendaraan dinas	12	Bulan	67,950,000	-	Bln	-	-	-	-	-	-	-	12	100%		

				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	102	unit	364,286,710	4	Unit	75,524,000	2	62,300,000	2	48,954,475	100	78.6	2	70,000,000	102	100%
2			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan	11	unit	71,000,000	1	Unit	5,500,000	3	6,500,000	3	3,725,000	100	57.3	3	15,940,000	11	100%
3			Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3	Item	35,000,000	-	Item	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100%
				Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12	unit	48,522,000	6	-	52,943,725	2	24,261,000	2	8,393,750	100	34.6	2	25,000,000	12	100%
4			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Rehabilitas sedang / berat Kantor	1	unit	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%
				Jumlah Rehabilitas Gedung Kantor	1	Unit	150,000,000	1	Gedung	99,173,000	1	22,700,000	-	-	-	-	-	-	1	100%
5			Peengadaan perahu karet dan mesin tempel	Jumlah pengadaan perahu karet dan mesin tempel	2	unit	200,000,000	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100%
6			Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI				11	Jenis	29,595,000	11	33,475,000	11	26,130,000	100	78.1	11	36,000,000		100%

			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor							5	35,000,000	4	29,900,000	80	85.4	-	-	100%	
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor							4	29,500,000	4	28,900,000	100	98.0	-	-	100%	
			Pembangunan Gudang Perikanan	Jumlah Pembangunan Gudang Perikanan							1	198,800,000	1	67,561,000	100	34.0	-	-	100%	
			Pengadaan aquarium	Jumlah Pengadaan Aquarium							1	25,000,000	1	24,999,000	100	100.0	-	-	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															97.50	70.74				
Predikat kinerja															ST	S				
III			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi Pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi			700,000,000	-	-	248,624,400			-	-	-	-	-	-		
	1			Jumlah Pemenuhan Kompetensi SDM Aparatur yang memenuhi standar Kompetensi																
	1		Pendidikan Anak Pelakun Utama Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Pengiriman Siswa Berprestasi Untuk Mengikuti Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan	1	Kali	350,000,000	-	kali	-			-	-	-	-	-	-	1	100%

4			Pelaksanaan Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera	3	Jenis	750,000,000	-	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	3	100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)													###	73.95						
Predikat kinerja													ST	S						
V			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)			2,944,458,000	4	-	715,323,000		991,859,000	43	585,968,000		492				
1			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	28	Kali	49,260,000	-	Kali	-	-	-	-	-	-	-	28	100%		
2			Pengelolaan BBI	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BBI	12	Bulan	123,344,000	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	12	100%		
3			Operasional dan Pengelolaan UPR	Jangka Waktu Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan UPR	6	Bulan	22,100,000	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	6	100%		
4			Pendampingan Program Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri	Jumlah Penyediaan Pendampingan Program Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri	9	Bulan	67,799,000	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	9	100%		
5			Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)	Belanja Induk Ikan BBI Lubuk Pinang	1	Paket	563,359,000	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	1	100%		
				.Belanja Ikan Pakan,	1	PAket				-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	
				.Belanja Tiang Listrik BBI Lubuk Pinang	25	Batang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100%
				.Rehabilitasi Saluran Drainase Kolam BBI Lubuk Pinang	31	Paket				-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	100%
				.Pembangunan Kerambah Jaring Apung (KJA)/ Percontohan Kerambah Jaring Apung Air Tawar	1	Unit				-	-	-	-	-	-	-	1	100%		

				Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan	6	Item	568,596,000	-		-	-	-	-	-	-			6	100%	
6			Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	16	Jenis	820,000,000	4		675,023,000	1	287,359,000	1	287,359,000	100.0	100.0			16	100%
7			Identifikasi Penyakit Ikan Se-Kabupaten Mukomuko	Jumlah Identifikasi Penyakit Ikan Se-Kabupaten Mukomuko	11	Jenis	80,000,000	-		-	-	-	-	-	-	-			11	100%
8			Sosialisasi Pengembangan Kesehatan Lingkungan Perairan	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Kesehatan Lingkungan Perairan	40	Kelompok	160,000,000	-		-	-	-	-	-	-	-			40	100%
9			Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN	Jumlah Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN	2	Unit	300,000,000	-		-	2	145,400,000	2	135,330,000	100.0	93.1			2	100%
10			Klarifikasi Usulan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat	60	Kelompok	90,000,000	20	Kelompok	23,900,000	20	20,000,000	20	19,800,000	-	-			60	100%
11			Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah pembentukan dan pendampingan Koperasi Kelompok Pembudidaya Ikan	4	Kelompok	100,000,000	1	Kelompok	16,400,000	10	30,000,000	10	29,720,000	100.0	99.1			4	100%
12			Pengembangan Budidaya ikan Lele	Jumlah Pengadaan Benih Ikan Lele dan Terpal				4	item	82,112,180	-	-	-	-	-	-			4	100%
13			Pelatihan Teknologi Perikanan	Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Perikanan							10	50,000,000	10	50,000,000	-	-			10	100%
14			Penyediaan Pakan Ikan	Jumlah Penyediaan Pakan Ikan							20,000	150,000,000	###	150,000,000	100.0	100.0			6,100	100%

15			Pembangunan Hatchery BBI Lubuk Pinang	Jumlah Pembangunan Hatchery BBI Lubuk Pinang						1	229,100,000	1	208,648,800	-	-			1	100%	
16			Pengadaan Kolam Ikan Bioflok	Jumlah pengadaan kolam Bioflok		Unit				12	80,000,000	12	80,000,000	100.0	100.0			12	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														71	82					
Predikat kinerja														S	T					
VI			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)			7,951,169,202	43	5,030,257,951		1,092,875,000	18	810,460,700	-	74.16		1,039,095,000			
1			Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAU)	Waktu Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAU)	15	unit/jenis	500,000,000	25	Unit	873,641,000		-	-	-	-			15	100%	
2			Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAK)	1). Pengadaan Jaring 2 Inchi, 2).Pengadaan Jaring 4 Inchi, 3). Pengadaan Jaring 5 Inchi, 4). Pengadaan Jaring Trammel Net, 5). Pengadaan Cool Box 100 Liter, 6). Pengadaan Mesin Tempel 15 PK, 7). Pengadaan Rawai (Mini Long Line)	180 330 330 399 140 6 35	piece, piece, piece, piece, unit, unit, set	1,431,851,202	-	Piece, unit, unit, set	-		-	-	-	-			180 330 330 399 140 6 35	100%	
				Jumlah Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan 40 PK	2	item	1,363,668,000	-	item	-		-	-	-	-			2	100%	
3			Penyediaan Peralatan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan	12	Jenis	1,200,000,000	3	Jenis	2,050,776,325	4	239,000,000	4	229,179,700	100.0	95.9	3	200,000,000	12	100%

4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan) DAK	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan) DAK	12	Jenis	1,120,000,000	5	Jenis	1,825,168,000	3	675,675,000	3	518,774,000	100.0	76.8	6	759,095,000	12	100%
5			Operasional Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Program Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	6	Bulan	53,150,000	-	Bulan	-			-	-	-	-	-	-	6	100%
6			Pembinaan Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	Jumlah Pembinaan Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	10	Kelompok	40,000,000	10	Kelompok	30,201,626			-	-	-	-	-	-	10	100%
7			Klasifikasi Alat Tangkap Se-Kabupaten Mukomuko	Jumlah Klasifikasi dan Penomoran Kapal Alat Tangkap	500	Unit	50,000,000	-	Unit	-			-	-	-	-	-	-	500	100%
8			Pembentukan Organisasi Nelayan	Jumlah Pelaksanaan Terbentuk HNSI	1	HNSI	50,000,000	-	HNSI	-			-	-	-	-	-	-	1	100%
9			Penomoran Kapal Nelayan se kabupaten Mukomuko	Jumlah Penomoran Kapal dan Alat Tangkap yang didata Se-Kabupaten Mukomuko	150	unit	52,500,000	150	unit	52,500,000			-	-	-	-	-	-	150	100%
10			Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah Pendataan Kapal dan Alat Tangkap SeKabupaten Mukomuko	90	Kelompok	100,000,000	30	Kelompok	29,590,000			30	-	-	-	-	-	90	100%
11			Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	40	klp	140,000,000	10	klp	23,181,000	10	30,000,000	10	30,000,000	100.0	100.0	-	-	40	100%
12			Sosialisasi Pengembangan Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah bimbingan Teknis Peningkatan SDM Nelayan	42	Kelompok	100,000,000	2	Kelompok	39,680,000			-	-	-	-	-	-	42	100%

13			Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pembangunan Tempat pelelangan Ikan	2	unit	1,300,000,000	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	2	100%		
14			Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan	2	unit	450,000,000	-	unit	-	2	148,200,000	1	31,052,000	50.0	21.0	-	2	100%	
14			Sosialisasi Asuransi Nelayan Se-Kabupaten Mukomuko	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Asuransi Nelayan	0	kali		2	kali	61,079,000			-	-	-	-	-	2	100%	
14			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tumbuhnya Kesadaran Nelayan tentang Peraturan Pemerintah		orang		100	orang	44,441,000			-	-	-	-	-	100	100%	
15			Penerbitan BPKP (Bukti Pencatatan kapal Perikanan Tangkap)	Jumlah Penerbitan BPKP (Bukti Pencatatan kapal Perikanan Tangkap)						200		35,800,000	200	30,728,000	100.0	85.8	-	200	100%	
16			Pembuatan Register Kapal	Jumlah pembuatan Register Kapal		Unit											171	50,000,000	171	100%
17			Penyediaan Papan Nama Kelompok Nelayan	Jumlah Penyediaan Papan Nama Kelompok Nelayan		Unit											30	30,000,000	30	100%
													Rata-rata capaian kinerja (%)		87.50	72.28				
													Predikat kinerja		T	S				
VII			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat SAKIP			426,750,000	-	-	32,930,000		15,000,000	-	14,030,000	-	93.53		15,000,000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				0%	-				-	-	-					

1				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Program DKP	2	Kali	50,000,000	-	Kali	-								2	100%	
2				Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan	5	Dokumen	35,000,000	-	dokumen	-								5	100%	
3				Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan renja Perubahan	11	dok	96,750,000	2	dok	32,930,000	2	15,000,000	2	14,030,000	100.0	93.5	2	15,000,000	11	100%
4				Pembuatan Profil Dinas	Jumlah Dokumen Profil Dinas	2	Dokumen	45,000,000	-	dokumen	-								2	100%	
5				Pembuatan DED Kelautan dan Perikanan	Jumlah DED Kelautan dan Perikanan	1	dok	200,000,000	-	dok	-								1	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	93.5					
Predikat kinerja															ST	ST					
VIII				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu			20,000,000	-		20,000,000										
1				Penyusunan laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja	3	Dokumen	20,000,000	3	dokumen	20,000,000	-							3	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-					
Predikat kinerja															SR	SR					
IX				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan			62,000,000	-		7,499,000		7,500,000	-	7,500,000		100.00		28,499,023		

1				Penyusunan laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja Tepat Waktu	12	Dokumen	62,000,000	2	Dokumen	7,499,000	3	7,500,000	3	7,500,000	100.0	100.0	2	7,500,000	12	100%
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							1	5,000,000	1	5,000,000	100.0	100.0	1	6,000,000	4	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100				
Predikat kinerja																ST	ST				
X				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)			3,833,289,860	-	-	257,123,520		340,000,000	-	288,826,896	-	84.95		623,000,000		
1				Operasional Pabrik Es	Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pabrik Es	12	Bulan	110,000,000	-	Bulan	-			-	-	-	-			12	100%
2				Operasional PUMP P2HP	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Program Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	5	Kelompok	50,000,000	-	Kelompok	-			-	-	-	-			5	100%
3				Penguatan Kelembangan UPI (Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan)	Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan dan Pembinaan Kelembangan UPI (Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan)	10	Kelompok	50,000,000	1	Kelompok	31,065,000			-	-	-	-			10	100%
4				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil produksi Perikanan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan	3	jenis	250,000,000	1	jenis	40,378,000			1	-	-	-			4	100%

5			Kampanye Peningkatan Konsumsi Ikan dan Lomba Diversifikasi produk Olahan Ikan	1). Jumlah Pelaksanaan Lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Kabupaten, 2). Jumlah Keikutsertaan dalam Lomba diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Provinsi, 3). Jumlah Pelaksanaan Kampanye Peningkatan Konsumsi Ikan	1 1 1	Kali Kali Kali	75,000,000	-	Kali	-								1 1 1	100%	
				Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan	12	Kali	310,000,000	3		68,120,000	3	250,000,000	3	238,111,896	100.0	95.2	12	100,000,000	12	100%
6			Pelaksanaan lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan	Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan	2	Kali	78,750,000	2	kali	69,189,520									2	100%
7			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)	1). Pembangunan Pasar Ikan Tradisional, 2).Pembangunan Sarana Air Bersih Pasar Ikan Tradisional, 3). Pengadaan Cool Box 200 Liter, 4). Pengadaan Cool Box 100 liter	2 2 48 100	Unit, Unit, Unit, Unit	952,188,160	-	Unit	-									2 2 48 100	100%
				Jumlah Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)	14	jenis	1,453,351,700	-	jenis	-		0	-	-	-	-	8	148,000,000	14	100%
8			Pengendalian Mutu dan higienitas Ikan	Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan	24	lokasi	210,000,000	6	lokasi	48,371,000	6	40,000,000	6	37,145,000	100.0	92.9	6	50,000,000	24	100%
9			Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB	jumlah yang mengikuti Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB	60	klp	100,000,000	-	klp	-	10	50,000,000	-	-	-	-	-	-	60	100%
10			Optimalisasi Pemanfaatan Pabrik Es	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Pabrik Es	2	unit	194,000,000	-	unit	-									2	100%

11			Promosi Produk-Produk Perikanan	Jumlah Promosi Produk-Produk Perikanan						2	30,000,000	2	29,920,000	100.0	99.7	2	75,000,000	2	100%	
12			Pelatihan Penanganan Ikan CPIB	Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan Ikan CPIB		Orang										20	100,000,000	20	100%	
13			Penyediaan Sarana dan Prasarana POKLAHSAR			Kelompok										2	50,000,000	2	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	94					
Predikat kinerja														ST	ST					
XI			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Pemanfaatan Lahan dan Perairan Umum (Ha)			945,000,000	-	411,432,000		220,000,000	-	210,700,600	-	95.77		-			
1			Pembangunan Kolam Ikan	Jumlah Pembangunan Kolam Ikan	25	Lokasi	750,000,000	15	Lokasi	365,693,000			-	-	-	-	-	25	100%	
2			Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyu	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyu	6	Item	195,000,000	2	Item	45,739,000	2	220,000,000	2	210,700,600	100	95.77	-	-	6	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)														###	95.77		-			
Predikat kinerja														ST	ST					
XII			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan Perikanan			82,000,000	-	-		-	-	-	-	-					
1			Statistik Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan	1	Kali	82,000,000	-	Kali	-			-	-	-	-	-	1	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-					

													Predikat kinerja	SR	SR					
XIII			Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Jumlah Kelompok Penangkar Penyu yang diberdayakan			575,000,000	-	-	36,051,500		170,000,000	-	49,820,000	-	-	145,000,000			
1			Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu	5	org	100,000,000	-	org	-			-	-	-	-	3	45,000,000	5	100%
2			Operasional Tim Pencegahan dan Penindakan Ilegal fishing	Jangka Waktu Penyediaan Operasional Pencegahan Ilegal Fishing	9	Bulan	100,000,000	-	Bln	-			-	-	-	-			9	100%
				Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Ilegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir	12	kali	250,000,000	3	kali	36,051,500	3	50,000,000	3	49,820,000	100	99.64	4	50,000,000	12	100%
3			Penguatan Kelembagaan POKMASWAS Sumber daya kelautan dan perikanan	1). Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2). Jumlah Pelaksanaan Study Banding POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 3).Jumlah Tukik yang dilestarikan	2, 1, 10,000	Kelompok Kali ekor	75,000,000	1	Kali	-			-	-	-	-			2, 1, 10,000	100%
				Jumlah Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10	kip	50,000,000	-	kip	-			-	-	-	-			10	100%
4			Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu dan Konservasi Ikan Mikh	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu dan Konservasi Ikan Mikh		Kali					2	70,000,000	2	57,253,500	-	-	-	-	2	100%

5			Penanaman Mangrove	Jumlah pelaksanaan penanaman mangrove		Batang				2,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000	100%	
6			Konservasi Penyu	Jumlah Kelompok Konservasi Penyu		Kelompok						-	-	-	-	3	50,000,000	3	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	100					
Predikat kinerja														ST	ST					
XIV			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya Klasifikasi Kelompok Masyarakat Perikanan						360,000,000	-	-	53,480,000		80,000,000	-	65,749,500		60,000,000	
1			Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	8	jenis	110,000,000	2	jenis	17,960,000	2	40,000,000	2	34,265,500	100	85.66	-	-	8	100%
2			Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR, POKDAKAN, KUB	Jumlah Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR, POKDAKAN, KUB	60	kip	200,000,000	15	kip	35,520,000	20	40,000,000	20	31,484,000	100	78.71	15	40,000,000	60	100%
3			Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan dan Kelembagaan Kelompok	Jumlah peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan dan Kelembagaan Kelompok	5	org	50,000,000	-	org	-		-	-	-	-	-	-	-	5	100%
4			Kelas Kelompok KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR	Terklasifikasinya Kelompok KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR								-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5			Peningkatan SDM Penyuluh Perikanan	Jumlah SDM Yang Mengikuti Orientasi Penyuluh Perikanan							4	30,000,000	4	30,000,000	100	100.00	-	-	4	100%
6			Klarifikasi Usulan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat		Kelompok										95	20,000,000	95	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	82					
Predikat kinerja														ST	T					

XV				Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan (Ton)			530,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1				Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAU)	Jumlah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAU)	300	unit	430,000,000	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	300	100%	
2				Penyediaan Alat Penanganan Ikan di atas Kapal (DAU)	Jumlah Pengadaan Alat Penanganan Ikan di atas Kapal (DAU)	20	unit	100,000,000	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-						
Predikat kinerja														SR	SR						
XVI				Program Pengembangan Sumberdaya Anak Pelaku Usaha Perikanan	Peningkatan Sumberdaya manusia Anak Pelaku Usaha Perikanan (Orang)			164,000,000	-	-	67,000,000		50,000,000	-	47,080,000	-	-	30,000,000			
1				Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan	Jumlah Siswa Taruna dan Taruni yang Mendapat Biaya Pendidikan	45	orang	164,000,000	18	orang	67,000,000	12	50,000,000	12	47,080,000	100.0	94.2	5	30,000,000	45	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	94.16						
Predikat kinerja														ST	ST						
XVII				Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (orang)			116,000,000	-	-	21,760,000		-	-	-	-	-	40,000,000			
1				Pendataan dan Validasi Calon Penerima asuransi Nelayan	Jumlah Calon Penerima asuransi Nelayan	2000	org	116,000,000	500	org	21,760,000		-	-	-	-	500	40,000,000	2000	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-						
Predikat kinerja														SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)														88.91	81.04						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)														T	T						

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan ;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, maka telah dihasilkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
2. Kebijakan pengembangan perikanan tangkap;
3. Kebijakan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan;
4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
5. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan;
6. Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
7. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Dinas perikanan Tahun 2021;

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tercantum pada **Tabel 2.2:**

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat			321	321	321	321	321	321	321	321	
2	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12	12	12	12	12	12	12	
3	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan			20	20	20	20	14	16	20	20	
4	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor			3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor			40	40	40	40	40	18	40	40	
6	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9	9	9	9	2	5	9	9	
7	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor			4	4	4	4	4	6	4	4	
8	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			29	29	29	29	22	19	29	29	
9	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman			3	3	3	3	3	3	3	3	
11	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah			26	26	31	31	48	51	31	31	

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah			170	170	180	180	259	235	180	180	
13	Jumlah Penerima Jasa Kantor			28	28	28	28	28	31	28	28	
14	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			25	25	25	25	25	25	25	25	
15	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan					3	0		3	3	0	
16	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			6	6	0	0	6	2	0	0	
17	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus lainnya			2	2	2	4			2	4	
18	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja			3	3	3	3	3	3	3	3	
19	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok wanita nelayan			1	1	1	3	1	1	1	3	
20	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera				3	3	3			3	3	
21	Jumlah Identifikasi Penyakit Ikan Se-Kabupaten Mukomuko				0	4	7			4	7	
22	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Kesehatan Lingkungan Peraian				10	15	15			15	15	
23	Jumlah Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN				1	1	0		2	1	0	

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya			4	4	4	4	4	1	4	4	
25	Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat			20	20		20	20	20		20	
26	Jumlah Pembentukan dan Pendampingan Koperasi Kelompok Tani Pembudidaya Ikan			1	1	1	1	1	10	1	1	
36	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan)			3	3	3	3		3	3	3	
37	Jumlah Pendataan Kapal dan Alat Tangkap SeKabupaten Mukomuko			30	30	30		30	30	30		
38	Jumlah Kelompok Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap			10	10	10	10	10	10	10	10	
39	Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan			3	3	3	3	3	4	3	3	
40	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Nelayan Perikanan Tangkap			0	0	0	40			0	40	
41	Jumlah Pembangunan Tempat pelelangan Ikan			0	0	1	1			1	1	
42	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan			0	0	1	1		1	1	1	
43	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan			1	1		1	1	1		1	
44	Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promoi Hasil Perikanan			3	3	3	3	3	3	3	3	

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Jumlah Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)			2	2	2	2			2	2	
46	Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan			6	6	6	6	6	6	6	6	
47	jumlah yang mengikuti Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB			0	0	30	30			30	30	
48	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Pabrik Es			0	0	1	1			1	1	
49	Jumlah Pembangunan Kolam Ikan			10	10	0	0	10		0	0	
50	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyu			2	2	0	2	2	2	0	2	
51	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu			0	0	3	2		2	3	2	
52	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Illegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir			3	3	3	3	3	3	3	3	
53	Jumlah Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			0	0	0	10			0	10	
54	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan			2	2	2	2	2	2	2	2	
55	Jumlah Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR, POKDAKAN, KUB			15	15	15	15	15	20	15	15	
56	Jumlah peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan dan Kelembagaan Kelompok			0	0	0	5		4	0	5	

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2018	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Jumlah Siswa Taruna dan Taruni yang Mendapat Biaya Pendidikan			20	20	5	12	18	12	5	12	
58	Jumlah Calon Penerima asuransi Nelayan			500	500	500	500	500		500	500	
59	Jumlah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAU)			0	0	100	200			100	200	
60	Jumlah Pengadaan Alat Penanganan Ikan di atas Kapal (DAU)			0	0	0	20			0	20	
61	Jumlah Peserta mengikuti Sosialisasi atas Peraturan dan Perundang Undangan dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut			0	0	600	600			600	600	
62	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan renja Perubahan			2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko masih mempedomani Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko maka. Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS, membawahi :
2. SEKRETARIS, membawahi dua Sub Bagian :
 - KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 - KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

3. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP, membawahi tiga Seksi :
 - KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
 - KEPALA SEKSI TEKNOLOGI KENELAYANAN DAN PERIZINAN
 - KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN SUMBER DAYA IKAN
4. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, membawahi tiga Seksi :
 - KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
 - KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN
 - KEPALA SEKSI SUMBERDAYA, PERIZINAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN
5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN, membawahi tiga Seksi :
 - KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA P2HP
 - KEPALA SEKSI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
 - KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN
6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan ikan;
3. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat;
4. Meningkatnya kesadaran hukum para pelaku utama perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) dan pelaku usaha perikanan (pengolah dan pemasar ikan);
5. Meningkatnya jumlah KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR yang berbadan hukum, sebagai salah satu syarat penerima bantuan;
6. Meningkatnya jumlah peserta asuransi nelayan;
7. Menurunnya penggunaan bahan terlarang (formalin, urea) pada ikan;

8. Teregister dan terklasifikasinya sarana prasarana pelaku perikanan, sehingga mempermudah dalam peningkatan kapasitas sumberdaya perikanan dan sarana prasarana perikanan.

Meskipun banyak peningkatan yang dicapai, akan tetapi masih banyak kendala dan permasalahanyang masih harus dihadapi oleh Dinas Perikanan kabupaten Mukomuko. Adapun kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
2. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan;
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Masih lemahnya kapasitas SDM dan Kelembagaan para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
5. Lebarinya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan kebutuhan rencana kegiatan.

Salah satu kinerja Dinas Perikanan yaitu meningkatnya produksi perikanan baik tangkap dan budidaya, serta meningkatnya konsumsi ikan, sehingga Dinas Perikanan dihadapkan dengan isu strategis yaitu masih belum optimalnya produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dan masih belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 harus menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil

analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Perikanan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perikanan dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maka Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud melalui tahapan: a.perencanaan data; b.pengumpulan data; c.pengisian data berbasis elektronik; dan d.pemeriksaan data berbasis elektronik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uraian Hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP	B		Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP	B		
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	65%		Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	65%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	7 Jenis Kegiatan	3,719,584,312	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	7 Jenis Kegiatan	3,719,584,312	
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%		
			Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%				Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%		
			Persentase ASN yang Disiplin	100%				Persentase ASN yang Disiplin	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%	24,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%	24,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	9,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	9,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	B	2,910,584,312	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	B	2,910,584,312	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,719,584,312	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,719,584,312	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	186,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	186,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	0	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	0	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai		-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai		-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	9 Layanan	183,620,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	9 Layanan	183,620,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	3 Jenis	7,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	3 Jenis	7,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya	8 Jenis	8,820,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya	8 Jenis	8,820,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Jenis	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Jenis	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	19,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	19,800,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Jenis	7,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Jenis	7,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	90 Kali	30,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	90 Kali	30,000,000	
		Dinas Perikanan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	16 Kali	81,000,000		Dinas Perikanan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	16 Kali	81,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	20,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	20,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi	0	-	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi	0	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	504,380,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	504,380,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138 Lembar	1,380,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138 Lembar	1,380,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	95,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	95,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34 Orang	408,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34 Orang	408,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jumlah Layanan	77,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jumlah Layanan	77,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis	70,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	7,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	7,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0		
Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan					Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan						
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	0.32		Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	0.32		
	Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan		Produksi perikanan tangkap	22832		Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan		Produksi perikanan tangkap	22832		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	33.54%	335,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	33.54%	335,000,000	
		Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	10.88%			Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	10.88%		
			Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya	2.95%				Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya	2.95%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka	40.00%				Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka	40.00%		
			Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	41.93%				Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	41.93%		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	222,000,000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	222,000,000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah Penyediaan peralatan penangkapan ikan	4 Jenis	212,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah Penyediaan peralatan penangkapan ikan	4 Jenis	212,000,000	
		Kecamatan Kota Mukomuko	Jumlah Pembangunan Balai Nelayan Koto Jaya				Kecamatan Kota Mukomuko	Jumlah Pembangunan Balai Nelayan Koto Jaya			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah pengadaan Sarana Usaha penangkapan ikan	2 Unit	10,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah pengadaan Sarana Usaha penangkapan ikan	2 Unit	10,000,000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	73,000,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	73,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah nelayan yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah nelayan yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah KUB penerima bantuan fasilitas badan hukum	6 Kelompok	22,500,000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah KUB penerima bantuan fasilitas badan hukum	6 Kelompok	22,500,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah keikutsertaan Kartu Kusuka/asuransi nelayan/BPJS	400 Orang	50,500,000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Terawang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah keikutsertaan Kartu Kusuka/asuransi nelayan/BPJS	400 Orang	50,500,000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI yang sudah dikelola	0	-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI yang sudah dikelola	0	-	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Pengadaan fasilitas penyelenggaraan aktifitas TPI	0	-	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Pengadaan fasilitas penyelenggaraan aktifitas TPI	0	-	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Rehabilitasi TPI Pulau Makmur	1 Unit	-	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Rehabilitasi TPI Pulau Makmur	1 Unit	-	
			Pembangunan TPI Kota Jaya	0	-			Pembangunan TPI Kota Jaya	0	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perahu/kapal yang sudah registrasi	50 Unit	20,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perahu/kapal yang sudah registrasi	50 Unit	20,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah pendaftaran Buku Pas kecil	50 Unit	20,000,000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kecamatan Air Rami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit	Jumlah pendaftaran Buku Pas kecil	50 Unit	20,000,000	
	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	0.32		Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	0.32		
	Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan		Produksi perikanan budidaya	7362		Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan		Produksi perikanan budidaya	7362		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	650,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	650,000,000	
			Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	2%				Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	2%		
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul	19%				Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul	19%		
			Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan	5%				Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan	5%		
			Persentase Produksi Perikanan Budidaya menggunakan Pakan Ikan Sesuai Standar	5%				Persentase Produksi Perikanan Budidaya menggunakan Pakan Ikan Sesuai Standar	5%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	15%	140,000,000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	15%	140,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Mekar Mulya , Kec. Penarik	Jumlah Peningkatan Kapasitas pembudidaya ikan	5	Rp60,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Mekar Mulya , Kec. Penarik	Jumlah Peningkatan Kapasitas pembudidaya ikan	5	Rp60,000,000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kec. Teramang Jaya, Kota Mukomuko, XIV Koto, Penarik. Selagan Raya	Jumlah Kelembagaan Pembudidaya Ikan yang di Fasilitas	5	30,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kec. Teramang Jaya, Kota Mukomuko, XIV Koto, Penarik. Selagan Raya	Jumlah Kelembagaan Pembudidaya Ikan yang di Fasilitas	5	30,000,000	
		Kec. Air Dikit, Desa Air Dikit dan Desa Pondok Lunang	Jumlah kelembagaan konservasi dan domestikasi ikan miki yang difasilitasi	2	20,000,000		Kec. Air Dikit, Desa Air Dikit dan Desa Pondok Lunang	Jumlah kelembagaan konservasi dan domestikasi ikan miki yang difasilitasi	2	20,000,000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Teramang Jaya, Kota Mukomuko, XIV Koto, Penarik. Selagan Raya, Pondok suguh, Air Rami, Air Manjuntio, Ipuh	Jumlah kelembagaan pembudidaya ikan yang diberi pendampingan	50	30,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Teramang Jaya, Kota Mukomuko, XIV Koto, Penarik. Selagan Raya, Pondok suguh, Air Rami, Air Manjuntio, Ipuh	Jumlah kelembagaan pembudidaya ikan yang diberi pendampingan	50	30,000,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5%	510,000,000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5%	510,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Kecamatan/ 151 Desa	Jumlah dokumen data dan informasi Pembudidaya ikan	1	20,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Kecamatan/ 151 Desa	Jumlah dokumen data dan informasi Pembudidaya ikan	1	20,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lubuk Pinang	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	3	Rp190,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lubuk Pinang	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	3	Rp190,000,000	
		Desa Air Dikit dan Desa Pondok Lunang Kec. Air Dikit	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana konservasi dan domestikasi ikanm mikih	5	Rp35,000,000		Desa Air Dikit dan Desa Pondok Lunang Kec. Air Dikit	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana konservasi dan domestikasi ikanm mikih	5	Rp35,000,000	
		Desa Lubuk Pinang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakan Alami	1	Rp20,000,000		Desa Lubuk Pinang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakan Alami	1	Rp20,000,000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Marga Mukti Kec. Penarik, Desa Sido Makmur Kec. Teramang Jaya	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan	3	Rp175,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Marga Mukti Kec. Penarik, Desa Sido Makmur Kec. Teramang Jaya	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan	3	Rp175,000,000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	3	15,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	3	15,000,000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang	Jumlah Pelaksanaan Temu Teknis Pembudidaya Ikan	1	55,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang	Jumlah Pelaksanaan Temu Teknis Pembudidaya Ikan	1	55,000,000	
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	32%		Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	32%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan		Produksi perikanan tangkap	22,832		Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan		Produksi perikanan tangkap	22,832		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan	33.33%	Rp 65,000,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan	33.33%	Rp 65,000,000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pencegahan illegal fishing dalam mempertahankan pendapatn masyarakat pesisir	3 kali	Rp 65,000,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pencegahan illegal fishing dalam mempertahankan pendapatn masyarakat pesisir	3 kali	Rp 65,000,000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Wilayah Laut Kab. Mukomuko	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Illegal Fishing	3 Kali	Rp 65,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Wilayah Laut Kab. Mukomuko	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Illegal Fishing	3 Kali	Rp 65,000,000	
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	32%		Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	32%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan		Produksi perikanan tangkap	22,832		Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan		Produksi perikanan tangkap	22,832		
	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	18%	450,000,000	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	18%	450,000,000	
			Persentase Pemasaran Hasil Perikanan	18%				Persentase Pemasaran Hasil Perikanan	18%		
			Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	5%				Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	5%		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persentase Jumlah Pelaku Usaha yang Diberdayakan	38%	50,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persentase Jumlah Pelaku Usaha yang Diberdayakan	38%	50,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mukomuko	Jumlah pelaksanaan promosi dan produk-produk perikanan	2 Kali	30,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mukomuko	Jumlah pelaksanaan promosi dan produk-produk perikanan	2 Kali	30,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Teramang Jaya, dan Kecamatan Ipuh	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Akta Notaris Berbadan Hukum	6 Kelompok	20,000,000		Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Teramang Jaya, dan Kecamatan Ipuh	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Akta Notaris Berbadan Hukum	6 Kelompok	20,000,000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Standar Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan	13%	80,000,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Standar Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan	13%	80,000,000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pegolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan Kota Mukomuko	Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perikanan	3 Orang	50,000,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pegolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kecamatan Kota Mukomuko	Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perikanan	3 Orang	50,000,000	
		Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Selagan Raya, dan Kecamatan Teras Terunjam	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Cepat Formalin	5 Lokasi	30,000,000		Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Selagan Raya, dan Kecamatan Teras Terunjam	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Cepat Formalin	5 Lokasi	30,000,000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	5%	320,000,000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	5%	320,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2022					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Jakarta	Jumlah Pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dalam rangka peningkatan konsumsi ikan	3 Kali	100,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Jakarta	Jumlah Pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dalam rangka peningkatan konsumsi ikan	3 Kali	100,000,000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Teramang Jaya, dan Kecamatan Ipuh	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	4 Jenis	220,000,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Teramang Jaya, dan Kecamatan Ipuh	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	4 Jenis	220,000,000	
			Jumlah Pembangunan Outlet Produk Perikanan	-	-			Jumlah Pembangunan Outlet Produk Perikanan	-	-	
			Jumlah Rehabilitasi Pasar Ikan	-	-			Jumlah Rehabilitasi Pasar Ikan	-	-	
					5,219,584,312					5,219,584,312	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan, terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2022.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2022, dibutuhkan peran serta daerah yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Perikanan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, maka dapat diidentifikasi Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

Tabel 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL/
PROPINSI BENGKULU UNTUK LIMA TAHUNAN

No	Kabupaten	Provinsi		Nasional	
1	2	3		4	
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2.	Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2.	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	2.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing	3.	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	3.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	4.	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	5.	Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif)	5.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
		6.	Prioritas Pembangunan	6.	Memperkuat Stabilitas

No	Kabupaten	Provinsi	Nasional
1	2	3	4
		untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19	PolHukHankam dan Tranformasi Pelayanan Publik

Tabel 3.2
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

KABUPATEN		PROVINSI		NASIONAL	
PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru	1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	1. Rehabilitas, Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
	2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan		2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja		2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	3. Perluasan kesempatan kerja		3. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan		3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
	4. Peningkatan akses dan kualitas layanan		4. Peningkatan akses dan kualitas Kesehatan		4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan

	Kesehatan				
	5. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat		5. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak dan distabilitas serta partisipasi pemuda dan olah raga dalam pembangunan		5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi
					6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
					7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
					8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan keluarga	2. Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta	1. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perkotaan	2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan

	miskin	perluasan konektivitas untuk pemerataan			
	2. Perlindungan PMKS		2. Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur strategis		2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
	3. Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial		3. Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim		3. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	4. Pengembangan dan Penguatan Peran Desa dalam pengentasan kemiskinan		4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup		4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	5. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan keluarga Miskin				5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda
					6. Pengentasan Kemiskinan

					7. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing
3. Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing	1. Pembangunan Sarana dan prasarana strategis	3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan	3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter
	2. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan		2. Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi		2. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
	3. Peningkatan kualitas		3. Peningkatan investasi		3. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk

	lingkungan pemukiman				Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial
	4. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana		4. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter
	5. Peningkatan konektivitas				
4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan Akuntabilitas serta Penataan hukum dan peraturan perundang-undangan	4. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
	2. Peningkatan produktifitas pangan		2. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penataan birokrasi		2. Infrastruktur Ekonomi
	3. Peningkatan		3. Peningkatan		3. Infrastruktur Perkotaan

	n realisasi investasi		Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		
	4. Peningkatan Produktifitas UMKM		4. Pengembangan wawasan kebangsaan serta penegakan demokrasi, keamanan dan ketertiban		4. Energi Dan Ketenagalistrikan
	5. Pengembangan sektor pariwisata				5. Transformasi Digital
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	5. Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif	1. Pelestarian, Pemajuan serta inklusifitas budaya dan pemahaman sejarah daerah	5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas Lingkungan hidup
	2. Pemanfaatan IPTEK dalam tata Kelola pemerintahan yang inovatif		2. Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Parawisata daerah		2. Peningkatan ketahanan Bencana dan iklim
	3. Pengembangan kualitas		3. Pengembangan ekonomi kreatif		3. Pembangunan rendah karbon

	SDM aparatur				
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan		4. Pengembangan desa Wisata dan Desa Digital		
		6. Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19		6. Memperkuat Stabilitas PolHukHanKam dan Tranformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi
					2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					3. Penegakan Hukum Nasional
					4. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
					5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Adapun tujuan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang mendukung dan bersinergi dengan Visi dan Misi Bupati Mukomuko sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatnya tata kelola kinerja OPD.

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko untuk Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya tata kelola kinerja OPD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, maka pada tahun 2021 melaksanakan 5 Program dan 15 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - C Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - F Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- A Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - b Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- B Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - b Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- C Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

III Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- A Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - a Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - b Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - c Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- B Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - e Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

- IV Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - A Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - a Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

- V Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - A Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - B Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - a Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pegolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - C Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.4. Adaptasi Tatahan Kehidupan Baru

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus

bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti liburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 4.). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

Gambar 4.1
Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan

(NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin

dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya

sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan

Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah

ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

3.5. Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya penanganan secara cepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder, untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait terkait penanganan Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Keputusan Bupati mukomuko Nomor :100-184Tahun 2020 Tentang Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease di Kabupaten Mukomuko;
3. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-208 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-185 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
4. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19;
5. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
- b. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.

3.6. Protokol Menghadapi Tatanan New Normal

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, kini virus corona sudah menjadi pandemi global dan menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 (dua ratus tiga belas) negara dan wilayah yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bisa luwes penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktifitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung keberlangsungan seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, rumah ibadah, layanan pendidikan dan sekolah, layanan kesehatan, pusat keramaian (pasar dan pertokoan), pelaku dunia usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko dimana terdapat

potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19, yang mengatur

1. Protokol Di Tempat Bekerja dan Perjalanan Dinas/Bisnis
 - a. Protokol di tempat bekerja;
 - b. Protokol Pada Perjalanan Dinas/Bisnis.
2. Protokol Pada Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah
3. Protokol Pada Layanan Pendidikan dan Sekolah
 - a. Protokol Pada Masa Transisi.
 - b. Protokol Normal Baru
4. Protokol Pada Layanan Kesehatan
5. Protokol Pada Pusat Keramaian (pasar dan pertokoan)
6. Protokol Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik).
7. Protokol Pada Penyelenggaraan Acara (pernikahan, konser dan acara olah raga).
8. Protokol Pada Transportasi Publik.

Berdasarkan Press Release pemutakhiran data zonasi risiko daerah yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional , Kabupaten Mukomuko telah terdaftar dalam zona hijau atau wilayah tanpa kasus Covid-19. Kondisi zona tersebut akan berimplikasi dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam masa adaptasi perubahan pola hidup baru (new normal).

Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease di Kabupaten Mukomukomengacu pada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan penyelenggaraan pembelajaran secara daring maupun tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama masa transisi, lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap bagi lembaga/satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS dan merasa siap dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga lembaga/satuan pendidikan;
 - b. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing) sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. Bagi sekolah dan madrasah berasrama dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru;
 - d. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana di atur dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor

HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- e. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - f. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan berasrama di atur sebagai berikut:
 - Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di pesantren dan pendidikan berasrama;
 - Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - Pimpinan, pengelola, pendidik dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan;
 - Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga pesantren dan pendidikan keagamaan, memeriksa kondisi asrama dan menaati protokol kesehatan;
 - Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memastikan asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
2. Masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan/pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung atau tenda, apabila pesta diadakan di rumah dengan penerapan protokol kesehatan ketat di

- pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk atau membatasi jam kunjungan tamu;
- b. Setiap orang yang menyelenggarakan dan menghadiri pesta perkawinan/pernikahan wajib memakai masker;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun di depan tenda atau pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan atau lokasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang datang ke tempat pesta dengan termogun;
 - e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri pesta pernikahan/perkawinan;
 - f. Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan pesta sebelum acara dimulai;
 - g. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar orang dan tidak bersalaman atau kontak fisik;
 - h. Masyarakat yang mengadakan pesta membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebelum rekomendasi izin keramaian dikeluarkan;
 - i. Disarankan untuk kegiatan konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang mengurangi interaksi antara pengunjung pesta;
 - j. Meniadakan kegiatan hiburan atau musik pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan.
3. Pada sektor pariwisata tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menerapkan protokol kesehatan ketat di pintu masuk lokasi wisata oleh petugas yang ditunjuk dengan menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun di depan pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di lokasi;
 - b. Pengelola dan pengunjung objek wisata wajib menggunakan masker;

- c. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 satu) meter antar orang dan menghindari kontak fisik;
 - d. Mengatur waktu kunjungan atau membatasi jumlah orang pada waktu dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya/banyak orang dalam satu lokasi;
 - e. Pengelola dan pengunjung tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan diri dari penularan Covid-19;
4. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan terkait protokol kesehatan dalam hal persiapan dan penyelenggaraan kegiatan;
 5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten melalui Dinas/Instansi terkait akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan/pernikahan dan sektor pariwisata;
 6. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau terjadi peningkatan resiko daerah, maka penyelenggaraan kegiatan akan ditinjau ulang atau dievaluasi kembali.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Adapun Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 selengkapnya akan di tampilkan pada tabel 4.1.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3																
3	25															
3	25	01														
3	25	01	2.01													
3	25	01	2.01	01												
3	25	01	2.01	06												
3	25	01	2.02													
3	25	01	2.02	01												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	150,150,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	12 Bulan	186,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	4,999,775	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Layanan		Layanan	9 Layanan	183,569,700						9 Layanan	189,820,000	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor				3 Jenis	6,998,850	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	3 Jenis	7,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Jenis	10,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	10 Jenis	10,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya				8 Jenis	8,818,050	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	8 Jenis	8,820,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7 Jenis	10,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	7 Jenis	10,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9 Jenis	9,999,800	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	9 Jenis	15,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Jenis	19,800,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	2 Jenis	21,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Jenis	7,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	7 Jenis	7,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				90 Kali 16 Kali	110,953,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	90 Kali 16 Kali	111,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	19,733,150						2 Jenis	12,620,000	
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2 Jenis	19,733,150	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	2 Jenis	12,620,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan		Layanan	3 Layanan	504,379,006						3 Layanan	506,380,000	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				138 Lembar	1,380,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	138 Lembar	1,380,000	Dinas Perikanan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	94,999,006	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	12 Bulan	97,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				34 Orang	408,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	34 Orang	408,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan		Layanan	2 Layanan	76,999,200						2 Layanan	77,000,000	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				2 Jenis	69,999,200	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	2 Jenis	70,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Jenis	7,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	3 Jenis	7,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	10,88 Persen 33,54 Persen 40 Persen 2,95 Persen 41,93 Persen	334,999,625						10,88 Persen 33,54 Persen 40 Persen 2,95 Persen 41,93 Persen	340,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen		Persen	2 Persen	222,000,000					2 Persen	119,500,000		
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan peralatan penangkapan ikan			4 Jenis	212,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah 4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Mukomuko	4 Jenis	112,500,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan Sarana Usaha penangkapan ikan			2 Unit	10,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah 4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Mukomuko	2 Unit	7,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen		Persen	2 Persen	72,999,850				2 Persen	90,500,000		
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB penerima bantuan fasilitas badan hukum			6 Kelompok	22,499,925	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah 4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Mukomuko	6 Kelompok	30,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah keikutsertaan Kartu Kusuka/asuransi nelayan/BPJS			400 Orang	50,499,925	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah 4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing	Pelaku Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Mukomuko	400 Orang	60,500,000	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang sudah dikelola	Unit		Unit	0 Unit	0						0 Unit	110,000,000	
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembangunan TPI Koto Jaya				1 Unit	0	Kab. Muko Muko, Kota Mukomuko, Koto Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Mukomuko	1 Unit	110,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perahu/kapal yang sudah registrasi	Unit		Unit	50 Unit	39,999,775						50 Unit	20,000,000	
3 25 03 2.04 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendaftaran Buku Pas kecil				50 Unit	39,999,775	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Mukomuko	50 Unit	20,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	5 Persen 0 Persen 19 Persen 5 Persen 2 Persen	649,999,950						5 Persen 0 Persen 19 Persen 5 Persen 2 Persen	600,000,000	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	Persen		Persen	15 Persen	140,000,000						15 Persen	100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah										
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peningkatan Kapasitas pembudidaya ikan						5 Orang	60,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	5 Orang	60,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan konservasi dan domestikasi ikan mihik yang difasilitasi Jumlah Kelembagaan Pembudidaya Ikan yang di Fasilitasi					2 Kelompok 5 Kelompok	50,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	2 Kelompok 5 Kelompok	10,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelembagaan pembudidaya ikan yang diberi pendampingan					50 Kelompok	30,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	50 Kelomp	30,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen			Persen	5 Persen	509,999,950							5 Persen	500,000,000	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Pembudidaya ikan					1 Dokumen	20,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	1 Dokume	20,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakan Alami Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Jumlah penyediaan sarana dan prasarana konservasi dan domestikasi ikan mihik					1 Paket 3 Jenis 5 Jenis	245,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	1 Paket 3 Jenis 5 Jenis	230,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan					3 Jenis	175,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	3 Jenis	180,000,000	Dinas Perikanan	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya				3 Jenis	15,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	3 Jenis	15,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelaksanaan Temu Teknis Pembudidayaan Ikan				1 Kali	54,999,950	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan Budidaya di Kabupaten Mukomuko	1 Kali	55,000,000	Dinas Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Persen		Persen	33.33 Persen	65,000,000						33.33 Persen	65,000,000	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan illegal fishing dalam mempertahankan pendapatn masyarakat pesisir	Kali		Kali	3 Kali	65,000,000						3 Kali	65,000,000	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Illegal Fishing				3 Kali	65,000,000	Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Utama Perikanan di Kabupaten Mukomuko	3 Kali	65,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Pengolahan Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	18 Persen 18 Persen 5 Persen	449,998,877						18 Persen 18 Persen 5 Persen	475,000,000	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah Pelaku Usaha yang Diberdayakan	Persen		Persen	38 Persen	49,999,227						38 Persen	55,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Akta Notaris Berbadan Hukum Jumlah pelaksanaan promosi dan produk- produk perikanan				6 Kelompok 2 Kali	49,999,227	Kab. Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Mukomuko	6 Kelompok 2 Kali	55,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Standar Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan	Persen		Persen	13 Persen	79,999,950						13 Persen	84,500,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Cepat Formalin Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perikanan				5 Lokasi 3 Orang	79,999,950	Kab. Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Mukomuko	5 Lokasi 3 Orang	84,500,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyuturan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Konsumsi ikan	Persen		Persen	5 Persen	319,999,700						5 Persen	335,500,000	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dalam rangka peningkatan konsumsi ikan				3 Kali	99,999,850	Kab. Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Mukomuko	3 Kali	105,500,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Outlet Produk Perikanan Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Jumlah Rehabilitasi Pasar Ikan				0 Paket 4 Jenis 0 Unit	219,999,850	Kab. Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Mukomuko	0 Paket 4 Jenis 0 Unit	230,000,000	Dinas Perikanan
TOTAL							5,219,584,312						5,205,843,481		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Dinas Perikanan disusun dengan menyesuaikan antara Renstra Tahun 2021-2026 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Dinas Perikanan.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja Program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan Program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Mukomuko, 2021

**Dinas Perikanan
Kabupaten Mukomuko**

KEPALA



EDDY APRIYANTO, SP, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19690417 199710 1 001